

Kepada Yang Terhormat :
KfW German Development Bank
BMU International Climate Initiative

Surat dari Suku Anak Dalam Batin Sembilan, Jambi

Kami adalah masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu di 9 aliran sungai yang mengalir ke Sembilan wilayah kehidupan kami. Sungai atau kami sebut dengan Batin, bagi kami, tak hanya berarti sebagai sumber kehidupan, tetapi juga identitas sosial dan budaya kami. Identitas keturunan suku dan wilayah kehidupan kami ditandai dengan nama-nama 9 aliran sungai tersebut, yaitu Batin Bulian, Batin Jebak, Batin Bahar, Batin Sekamis, Batin Jangga, Batin Singgoan, Batin Burung Antu, Batin Pemusiran dan Batin Telisak.

Nenek moyang kami adalah "Depati Seneneng Ikan Tanah" serta Raden Ontar adalah pemimpin wilayah 9 Batin sebelum Pemerintah Kolonial Belanda datang ke Jambi. Secara turun temurun kami hidup dengan cara-cara tradisional, yaitu berburu binatang, mencari buah-buahan dan mengambil madu di pohon sialang. Hubungan kami dengan sumber-sumber kehidupan yang disediakan alam sangatlah erat, demikian juga hubungan dengan tanah dan sumber air. Tata kelola dan tata kuasa tanah diatur melalui hubungan-hubungan sosial antar keluarga ("puyang" dan "waris") serta pengetahuan tradisional. Namun kebijakan pemerintah dan masuknya industri ekstraktif yang masuk kewilayah adat kami telah mengganggu tatanan kehidupan kami.

Sejak tahun 2007, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) sebuah perusahaan konservasi masuk ke wilayah kehidupan Suku Anak Dalam terutama di Sungai Kandang (Batin Bahar), Sungai Markanding (Batin Bahar) dan Sungai Lalan. Menurut PT REKI, mereka telah mendapatkan izin konsesi dari Kementerian Kehutanan. Namun Proses perizinan ini sama sekali tidak pernah melibatkan kami. Baik pihak Kementerian Kehutanan, ataupun pihak PT REKI tidak pernah melakukan konsultasi atau menanyakan persetujuan kami tentang rencana mereka membuat proyek konservasi, yang dinamakan mereka sebagai Restorasi Ekosistem. Sebaliknya, PT REKI lebih mengutamakan proses dialog yang tidak bebas dan tidak memberikan informasi yang luas serta komprehensif tentang rencana kerja mereka, tetapi malah sering kali mengatakan bahwa mereka adalah pemegang izin tanah dan hutan, yang sebenarnya secara historis adat adalah milik kami, dengan argumentasi telah mendapatkan izin legal dari Kementerian Kehutanan.

Kami tidak menyangkal bahwa ada kelompok Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang ikut dalam program PT REKI melalui "kemitraan kerjasama pembibitan", "Mitra Zone" dan juga bekerja sebagai karyawan PT REKI. Tetapi hendaknya, harus dihormati juga kelompok Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang memilih tidak bersedia untuk bekerjasama dengan PT REKI. Tidak boleh ada diskriminasi bahkan intimidasi terhadap kelompok Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang memilih tetap mempertahankan hak adat atas tanah dan memperjuangkan kedaulatan sumber kehidupan tanpa harus menjadi buruh, karyawan, pekerja atau bermitra dengan PT REKI.

Menurut pandangan kami, pihak PT REKI harus menghindari pendekatan "pecah-belah" terhadap kami Suku Anak Dalam Batin Sembilan. Dalam hati kami, tidak ada sama sekali kami menyalahkan bahkan menghina sanak keluarga kami yang memilih bekerja sama dengan PT REKI, kami menghormati pilihan mereka. Tetapi, kami akan melawan, jika pilihan kami untuk tidak bekerja sama dengan PT REKI

dianggap sebagai pengganggu proyek restorasi ekosistem PT REKI, dan kemudian kami diperlakukan seperti orang bodoh, tidak boleh menyatakan pendapat berbeda, tidak boleh melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bersimpati kepada pilihan sikap kami atau juga diperlakukan seperti kriminal. Kami juga akan terus berjuang untuk menegakkan kedaulatan kami atas sumber kehidupan berbasis tata kelola tanah dan sumber kekayaan alam, karena itulah pengetahuan dan keahlian tradisional kami.

Awalnya, kami menaruh harapan besar kepada PT REKI, kami berharap PT REKI berbeda dengan perusahaan HPH dan perkebunan monokultur, yang tidak menghargai hak adat kami bahkan mengubah tata pengetahuan serta pola kehidupan kami. Tetapi, beberapa perlakuan PT REKI kembali mengingatkan kami akan peristiwa masa lalu, seperti tidak diberikannya kepada kami informasi yang baik dan mudah difahami tentang rencana PT REKI, tidak dilakukannya konsultasi apalagi persetujuan dari kami tentang proyek PT REKI serta perlakuan intimidatif yang dilakukan oleh staff PT REKI yang berakibat berpindahannya beberapa keluarga kami ke tempat lain, karena takut mengalami pengusiran seperti pernah kami alami juga mencari sumber kehidupan yang lain karena sudah terbatas untuk mencari sumber kehidupan didalam hutan.

Kami faham bahwa PT REKI adalah perusahaan konservasi yang bertujuan menjaga serta memperbaiki kondisi hutan tropis Indonesia yang semakin punah. Dan ini juga sesuai dengan nilai serta tata kehidupan yang kami yakini, karena sumber daya hutan adalah urat nadi kehidupan kami. Tetapi, kami meminta PT REKI dan Kementerian Kehutanan juga memahami bahwa kami mempunyai hak adat turun temurun diatas tanah yang sekarang dijadikan proyek konservasi-restorasi oleh PT REKI. Cukuplah sudah penindasan kehidupan dan perampasan hak yang kami alami selama ini dilakukan oleh perusahaan HPH dan perkebunan monokultur, jangan lagi PT REKI melakukan hal yang serupa.

Untuk itu, kami masyarakat Suku Anak Dalam Batin Sembilan dari Sungai Kandang, Sungai Markanding dan Sungai Lalan, meminta kepada KfW Bank Pembangunan Jerman dan BMU International Climate Initiative, sebagai pendukung keuangan dari proyek konservasi-restorasi PT REKI :

1. Menegur dan mengingatkan PT REKI untuk menghormati hak-hak Suku Anak Dalam Batin Sembilan, khususnya kami yang tinggal di Sungai Lalan, Sungai Markanding dan Sungai Kandang.
2. Mengingatkan PT REKI agar tidak melakukan praktek intimidasi terhadap masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan, juga tidak membatasi kami untuk meminta bantuan serta membangun komunikasi dengan NGO yang peduli terhadap nasib dan perjuangan kami, karena ini sama saja dengan melakukan isolasi dan interaksi kami dengan pihak luar.
3. Melakukan evaluasi terhadap proyek PT REKI, karena tidak memberikan informasi yang luas, menyeluruh dan mudah kami fahami tentang rencana kerja PT REKI, tidak melakukan konsultasi yang seimbang dan adil, serta tidak mendengarkan pendapat kami secara bebas tentang proyek PT REKI.
4. Meminta PT REKI agar mengutamakan penyelesaian konflik secara damai, seimbang, adil dan bermartabat serta menghargai hak masyarakat adat. Tidak mempergunakan bahasa dan pola komunikasi yang intimidatif, merendahkan kami serta cenderung memaksa untuk mengikuti rencana kerja yang sudah dirumuskan oleh PT REKI secara sepihak.

Demikian surat dari kami, besar harapan kami BMU International Climate Initiative dan KfW bisa memberikan tanggapan yang baik.

Jambi, 18 Maret 2013
Perwakilan Tokoh Adat Suku Anak Dalam Batin 9



Dul Hadi
Sungai Kandang



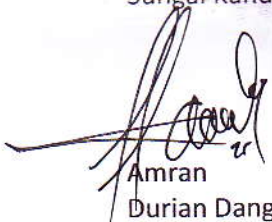
Hasan Badak
Sungai Kandang



Mat Samin
Sungai Kandang



Ali f
Sungai Kandang



Amran
Durian Dangkal



Jufri Samanudin
Pangkalan Ranjau Sungai Lalan



Hambali
Pangkalan Ranjau Sungai Lalan